

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENATAAN DAN PEMEBRDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Arizka Endah Chayani

NIM 14250042

Pembimbing:

Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M. Ag.

NIP 197010101999031002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: B-995 /Un.02/DD/PP.05.3/05/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2015 (STUDI KASUS RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
KE TAMAN KULINER WONOSARI)

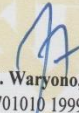
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arizka Endah Chayani
NIM/Jurusan : 14250042/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai Munaqasyah : 95 (A)

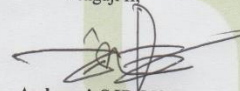
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

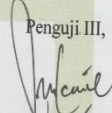
Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Waryono, M.Ag.
NIP 19701010 199903 1 002

Penguji II,



Andayani, S.IP, MSW
NIP 19721016 199903 2 008

Penguji III,


Noorkamilah, S.Ag, M.Si.
NIP 19740408 200604 2 002

Yogyakarta, 16 Mei 2018
Dekan,




Dr. Hj. Nurjannah, M.Si
NIP 195600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281, email: fd@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Arizka Endah Chayani

NIM : 14250042

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA (STUDI KASUS RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
KE TAMAN KULINER WONOSARI)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi

Yogyakarta,

Pembimbing


Andayani, S. IP, MSW
NIP 197210161999032008


Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M. Ag.
NIP 197010101999031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arizka Endah Chayani
NIM : 14250042
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Taman Kuliner Wonosari) adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan sesuai ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Mei 2018

Yang menyatakan,


Arizka Endah Chayani
NIM. 14250042

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 54, maka saya:

Nama : Arizka Endah Chayani
NIM : 14250042
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Siraman III, Siraman, Wonosari, Gunungkidul

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikesudahan hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 1 Mei 2018

Yang menyatakan,


Arizka Endah Chayani

NIM. 14250042

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas nikmat dan karunia Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Sumanto dan Ibu Sumiyati, yang selalu memberikan doa dengan setulus hati serta dorongan yang tidak henti-hentinya.
2. Kakak laki-laki saya Dicka Fajar Darmawan, S.T tercinta yang turut mendoakan dan memberikan dukungan.
3. Almamaterku tercinta Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

“Teruslah berbuat baik, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang membawa kita ke Surga kelak”

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Taman Kuliner Wonosari)”**. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nurjannah, M. Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Andayani, SIP, MSW selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.

4. Aryan Torrido, SE., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan mengarahkan selama perkuliahan dari semester awal hingga saat ini.
5. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah banyak meluangkan waktu, pemikiran, dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini selesai.
6. Dosen-dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan.
7. Teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2014 yang mampu membangkitkan rasa kekeluargaan, senantiasa memberikan semangat, kritikan maupun nasehat.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang Pengelolaan Pasar, Pol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul yang telah membimbing dan memberikan informasi kepada penulis selama di lapangan.
9. Keluarga besar mahasiswa Bidikmisi dan Assaffa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung penulis baik dalam segi pendanaan maupun keterampilan di luar akademik.
10. Kelompok KKN Dusun Putat II, Patuk, Gunungkidul yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat menyelesaikan karya ini.

11. Sahabat-sahabat terhebat penulis Mahayu, Edi, Emy, Wahyu, Teguh, IImi, dan Malik yang selama ini selalu memberikan kritikan, pesan, dan dukungan demi tercapainya sebuah karya ini.
12. Sahabat-sahabat penulis dalam setiap kegiatan *soft skill* Hani, Mesty, Refa, Risna, dan Asmanung yang telah banyak memberikan pengalaman dalam kepanitiaan kegiatan maupun penelitian.
13. Asmawati Eka Lestari teman satu bimbingan penulis yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bertukar pikiran bersama dari awal berjuang mengajukan judul skripsi hingga saat ini.
14. Teristimewa untuk keluarga penulis yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan Kakak yang selama ini memberikan begitu banyak perhatian, kasih sayang, ilmu, dukungan material hingga mampu mewujudkan cita-cita penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut kepada penulis, diberikan balasan oleh Allah SWT dan harapannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperluas pengetahuan. Terimakasih.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Mei 2018

Arizka Endah Chayani

NIM. 14250042

ABSTRAK

Pertumbuhan PKL di kawasan Kota Wonosari setiap tahun mengalami peningkatan. Data terakhir dari Disperindag Kabupaten Gunungkidul menunjukkan sebanyak 107 PKL telah memadati kawasan Alun-alun Wonosari dan Kantor Pemda Kabupaten Gunungkidul. Aktivitas PKL tersebut menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya ruang publik yang mulai terganggu seperti berkurangnya hak pengguna jalan, produksi sampah di sekitar tempat berdagang, serta limbah bekas produksi yang mengurangi keindahan tata ruang kota. Situasi tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan relokasi PKL ke tempat peruntukkannya sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perda, dan dampak dari implementasi perda tersebut bagi pemerintah, PKL, serta masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 11 orang diantaranya, 1 orang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul bagian Pengelolaan Pasar, 1 orang Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, 1 orang Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul, 4 orang PKL, 1 orang Ketua PKLM, dan 3 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sedangkan teknik keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi dengan sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dikatakan berhasil. Proses implementasi dimulai dengan sosialisasi kepada PKL, dilanjutkan pengorganisasian baik dari segi pendanaan maupun SDM yang terdiri dari Pengelolaan Pasar, Dishub, dan Pol PP, serta relokasi PKL ke tempat peruntukkannya yakni Taman Kuliner Wonosari tanpa ada konflik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi perda tersebut antara lain faktor komunikasi yang intens, sumberdaya baik pelaksana maupun dana yang memadai, disposisi pelaksana yang tidak otoriter, dan struktur birokrasi yang tidak terfragmentasi. Dampak dari relokasi tersebut meningkatkan citra positif pemerintah sekaligus mampu menyediakan tempat berdagang yang layak untuk PKL, PKL mendapatkan tempat berdagang yang nyaman dan terjamin meskipun dari segi penghasilan belum stabil, dan untuk masyarakat sendiri lebih nyaman dari segi lalu lintas yang sudah tertata serta memberikan alternatif baru dalam berwisata kuliner.

Kata kunci: **Relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL).**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Pembahasan	35

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Taman Kuliner Wonosari	37
B. PKL Taman Kuliner Wonosari	40
C. Kolaborasi <i>Stakeholder</i> Pelaksana Relokasi	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun

2015

1. Tahap Interpretasi.....53
2. Tahap Pengorganisasian.....63
3. Tahap Aplikasi67

B. Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015

1. Komunikasi86
2. Sumber daya.....88
3. Disposisi.....90
4. Struktur Birokrasi.....93

C. Dampak relokasi terhadap Pemerintah, PKL, dan Masyarakat

1. Dampak terhadap Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.....95
2. Dampak terhadap PKL.....99
3. Dampak terhadap masyarakat101

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan108
- B. Saran109

DAFTAR PUSTAKA112

LAMPIRAN116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	46
Tabel 3.1 Tarif Retribusi Sarana Prasarana Pasar	76
Tabel 3.2 Dampak relokasi terhadap pemerintah, PKL, dan masyarakat	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Gunungkidul	37
Gambar 2.2 Taman Kuliner Wonosari sebagai Wadah Relokasi PKL	38
Gambar 2.3 PKL berdasarkan kecamatan di Kabupaten Gunungkidul	41
Gambar 2.4 Presentase PKL yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul dan Luar Kabupaten Gunungkidul	42
Gambar 2.5 Struktur Organisasi Paguyuban PKLM Taman Kuliner Wonosari	43
Gambar 2.6 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul	48
Gambar 2.7 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul.....	50
Gambar 2.8 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul	52
Gambar 3.1 Alur Komunikasi Implementasi Perda Nomor 3 tahun 2015	58
Gambar 3.2 Tahap Aplikasi Relokasi PKL ke Taman Kuliner Wonosari	68
Gambar 3.3 Tampilan <i>Fanspage</i> Taman Kuliner Wonosari	78
Gambar 3.4 Kawasan Kntor Pemda Kabupaten Gunungkidul yang tidak diperkenankan untuk Berdagang	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aktivitas perdagangan bukan merupakan hal baru yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 24,99 persen jumlah penduduk yang bekerja di Gunungkidul diantaranya adalah pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Sedangkan yang menjadi pengusaha baik sendiri maupun berusaha dibantu buruh, baik tetap maupun tidak tetap mencapai 39,74 persen. Berdasarkan perbandingan menurut sembilan lapangan usaha utama, pilihan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di Gunungkidul yakni sebanyak 52,40 persen dan sebanyak 13,17 persen berada pada sektor perdagangan, rumah makan dan hotel. Sementara pekerja di sektor jasa kemasyarakatan, sosial, perorangan sebanyak 11,58 persen. Kemudian pekerja di sektor bangunan sebanyak 10,24 persen dan pekerja di sektor industri pengolahan sebanyak 7,8 persen. Sedangkan untuk sektor lainnya masing-masing sebanyak kurang dari 3 persen.¹

Selama 2009-2013, jumlah usaha perdagangan di Gunungkidul selalu bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah pedagang besar pada tahun 2010 sebanyak 73 dan mengalami kenaikan sebanyak 100 pedagang pada tahun 2011. Sementara jumlah pedagang menengah dan pedagang kecil pada tahun

¹ BPS Kabupaten Gunungkidul, *Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul*, (Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2016), hlm. 15.

2013 juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 2,95 persen dan 3,58 persen dari tahun 2012. Pada tahun 2013, jika ketiga jenis pedagang tersebut digabungkan, maka didapat presentase pedagang kecil 92,21 persen, pedagang menengah 5,73 persen, dan pedagang besar 2,06 persen.²

Pedagang Kaki Lima (PKL) pun turut menyumbang kenaikan angka usaha perdagangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah PKL yang beroperasi di pusat Kota Wonosari dari tahun ke tahun. Menurut data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gunungkidul, hingga tahun 2017 sebanyak 107 PKL telah memadati pusat kota. Pusat Kota Wonosari dianggap lebih menjanjikan untuk berdagang, karena ketika PKL berjualan di pusat kota maka produk yang ditawarkan akan lebih cepat terjual dalam waktu yang singkat yang artinya daya beli masyarakat di kota lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Keuntungan tersebut menjadikan PKL semakin tertarik untuk datang dan membuka lapak di pusat kota.³

Peningkatan jumlah PKL di Pusat Kota Wonosari yang demikian, pada kenyataannya justru mengancam tata ruang kota khususnya kawasan Kantor Pemda Kabupaten Gunungkidul. Beberapa masalah yang timbul akibat aktivitas PKL tersebut diantaranya, berkurangnya hak pengguna jalan dimana trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki justru digunakan

² BPS Kabupaten Gunungkidul, *Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul*, (Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2016), hlm. 30.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Larno selaku Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

untuk membuka lapak para pedagang, peningkatan sampah di sekitar tempat berdagang, serta limbah yang dihasilkan dari hasil produksi membekas di beberapa titik jalan. Di sisi lain, tidak adanya pihak yang menjamin keselamatan para PKL saat berjualan di pinggir jalan tentu menjadi masalah tersendiri karena kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja.⁴

Kondisi tersebut menuntut Bupati Kabupaten Gunungkidul untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Perda tersebut memuat tujuan dikeluarkannya perda yakni menetapkan lokasi usaha PKL sesuai peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL yang tangguh dan mandiri, serta mewujudkan tata ruang kota yang bersih, indah, dan aman. Upaya penataan

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Larno selaku Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

nantinya akan disertai dengan pendataan dan pendaftaran PKL ke dinas terkait sebagai bentuk kepastian hukum yang akan dibantu oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Berdasarkan perda tersebut, upaya relokasi tidak berhenti di penataan saja namun pemerintah juga bertanggungjawab untuk melakukan pemberdayaan terhadap PKL. Pemberdayaan tersebut berupa fasilitas permodalan, sarana prasarana, peningkatan produksi, hingga pengembangan jaringan dan promosi.⁶

Atas dasar amanah dari isi perda tersebut, Pemda Kabupaten Gunungkidul bersepakat merelokasi PKL ke tempat peruntukkannya sebagai tanggungjawab pemerintah atas penataan kota yang akan dilakukan. Pemda telah menyediakan alternatif aktivitas perdagangan mereka agar tidak mematikan sumber perekonomian para pedagang. Oleh karena itu, dibangunlah Taman Kuliner Wonosari sebagai wadah atas relokasi tersebut sekaligus kejelasan atas masa depan para PKL.

Bukan hal mudah bagi jajaran pemerintah untuk mengambil hati para pedagang agar mau dipindah ke lingkungan yang baru. Keraguan akan pelanggan dan pendapatan, menjadi alasan mutlak bagi para PKL. Di Indonesia khususnya kota-kota besar telah banyak upaya relokasi yang dilakukan pemerintah, seperti relokasi PKL di Pasar Tanah Abang Jakarta. Relokasi yang hampir memakan waktu lima tahun sejak kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat ini dinilai belum berhasil. Hal

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

ini disebabkan karena Blok G yang telah disiapkan pemerintah sebagai wadah relokasi sepi pengunjung. Pada akhirnya PKL kembali turun ke jalan untuk menjajakan dagangannya karena tempat tersebut dirasa tidak efektif untuk berjualan.⁷

Upaya relokasi terhadap PKL pun terjadi di Kota Yogyakarta khususnya di kawasan selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. PKL dengan tegas menyatakan tidak setuju jika harus direlokasi ke kawasan Lempuyangan meskipun hanya sementara. Selain tidak adanya penjelasan terlebih dahulu antar PKL dengan Dinlopas (Dinas Pengelolaan Pasar), Pemkot (Pemerintah Kota), dan PT KAI (Kereta Api Indonesia), mereka mengaku telah rutin membayar retribusi. Relokasi dilakukan guna menunjang kawasan Malioboro agar Jalan Pasar Kembang tidak terlihat kumuh dan menimbulkan kemacetan.⁸

Fenomena relokasi di berbagai daerah tersebut menjadi tugas dan pembelajaran penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gunungkidul untuk mengupayakan relokasi tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan terhadap PKL di kawasan Pemda Kabupaten Gunungkidul. Pada tanggal 20 Mei 2016, sebanyak 107 PKL bersedia untuk direlokasi dan saat ini telah memakan dua kawasan sekaligus untuk menampung pedagang tersebut. Satu tahun pasca relokasi tersebut,

⁷ <https://www.merdeka.com/jakarta/tak-cukup-lima-tahun-bersihkan-tanah-abang-dari-pkl.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 18.39 WIB.

⁸ <http://jogja.tribunnews.com/2016/10/05/pedagang-di-jalan-pasar-kembang-menolak-direlokasi-ke-kawasan-lempuyangan> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 10.59 WIB.

PKL sudah mampu beradaptasi dengan baik dan menjalani aktivitas perekonomian seperti sedia kala tanpa menuai konflik. Saat ini PKL memiliki sebuah paguyuban yang bernama PKLM (Pedagang Kaki Lima Mandiri) sebagai wadah dengan asas gotong royong dan kekeluargaan. Paguyuban tersebut bersepakat menyisihkan sebagian keuntungan dari hasil penjualan untuk dialokasikan dalam bentuk kas bersama. Kemandirian para PKL terbukti ketika fasilitas yang berada di Taman Kuliner mengalami kerusakan. Bagi PKL, hal tersebut bisa ditanggulangi bersama tanpa harus menunggu dana dari pemerintah demi kenyamanan pengunjung dan PKL itu sendiri.⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang relokasi PKL ke Taman Kuliner Wonosari berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut perlu diteliti lebih dalam untuk mengetahui proses implementasi perda, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi perda, serta dampak implementasi perda tersebut terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, PKL dan masyarakat.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Larno selaku Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul No 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)?
3. Bagaimana dampak relokasi terhadap Pemda Kabupaten Gunungkidul, PKL dan masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui proses implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Mengetahui faktor-faktor keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Mengetahui dampak relokasi terhadap Pemda Kabupaten Gunungkidul, PKL dan masyarakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan keilmuan mengenai implementasi kebijakan, relokasi dan dampak dari suatu kebijakan yang telah diimplmentasikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemda Kabupaten Gunungkidul dan contoh bagi pemerintah daerah kabupaten lain dalam mengimplemntasikan kebijakan khususnya relokasi kepada PKL.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menunjukan keaslian dan relevansi atau fokus pada penelitian ini, maka penulis perlu meninjau tentang penelitian yang telah ada.

Pertama, Rudi Laksono (2013) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam skripsinya yang berjudul ***Analisis Relokasi Pedagang Pasar Ngarsopuro di Kota Surakarta***. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teori yang digunakan adalah teori pendapatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan pedagang setelah direlokasi justru menurun dari Rp 48.483.750,- menjadi Rp 18.058.700,- per bulan. Penurunan tersebut pun berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat oleh pedagang, yang semula Rp 12.768.759,- setelah direlokasi menjadi Rp 2.335.875,- per bulan. Akibat

dari penurunan tersebut, sebanyak 28 pedagang memilih untuk berpindah tempat usaha dari lokasi pasar yang telah disediakan.¹⁰

Kedua, Aji Wahyu Heriyanto (2012) mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dalam jurnalnya yang berjudul ***Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang***. Skripsi tersebut menggunakan analisis inferensi dan deskriptif presentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi PKL di Simpang Lima dan Jalan Pahlawan membawa pengaruh positif berupa tempat relokasi lebih nyaman dan terjaga kebersihannya serta mendapat pengawasan dari pemerintah. Sedangkan dari segi pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 262.867,- setelah adanya relokasi tersebut. Namun, yang masih menjadi kendala adalah infrastruktur fasilitas seperti kawasan pejalan kaki yang rusak dan lahan parkir yang kurang.¹¹

Ketiga, Nur Fatnawati (2013) mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam skripsinya yang berjudul ***Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta***. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yuridis empiris dan tinjauan umum pedagang kaki lima

¹⁰ Rudi Laksono, *Skripsi Analisis Relokasi Pedagang Pasar Ngrasopuro di Kota Surakarta*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013), hlm. 52.

¹¹ Aji Wahyu Heriyanto, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1: 2, tahun 2012, hlm. 5.

serta peraturan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa a) dampak positif yang diterima PKL adalah mendapatkan kepastian hukum dan dampak negatifnya adalah pembagian los pedagang yang tidak sesuai dengan jenis dagangannya, b) dampak positif bagi masyarakat adalah termudahkannya masyarakat untuk mengakses kebutuhan sehari-hari serta kembalinya kenyamanan dan ketertiban kota dan dampak negatifnya adalah menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar, c) dampak positif bagi pemerintah adalah menunjang peningkatan pendapatan daerah dan dampak negatifnya adalah rendahnya pemahaman tentang relokasi sehingga menyulitkan proses relokasi.¹²

Keempat, Trisni Utami (2009) mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam jurnalnya yang berjudul ***Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan***. Penelitian tersebut menggunakan metode *Participation Action Research* dan teori pemberdayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pedagang di Pasar Notoharjo Semanggi pasca relokasi yaitu dengan penguatan kapasitas bisnis untuk komunitas PKL, perlunya pemberdayaan ekonomi melalui akses bantuan permodalan, perlu dibangun komunikasi yang lebih dengan para birokrat, perlu dibangun forum bersama antar stakeholder dan pengembang pasar tradisional sehingga punya daya saing dengan pasar modern, perlu

¹² Nur Fatnawati, *Skripsi Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 96.

pendampingan bagi pedagang dalam pemecahan masalah di tempat yang baru, penataan dengan pendidikan lingkungan agar tidak terjadi kekumuhan, dan perlu penguatan komunitas Pasar Notoharjo dalam membangun daya saing pasar tradisional di Surakarta.¹³

Kelima, Eka Evita, dkk mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dalam jurnalnya yang berjudul ***Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)***. Jurnal tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL pada BTC (*Batu Tourism Center*) merupakan implementasi yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena emosional PKL, Pemerintah Kota Batu bersama pihak pengelola kurang memberika dukungan terhadap kebijakan sehingga terjadi penolakan dari PKL, jumlah PKL yang terus membengkak sehingga Satpol PP mengalami kesulitan dalam penertiban, serta kurangnya kesadaran PKL sehingga pedagang kembali berjualan ke jalan dan meninggalkan BTC.¹⁴

Keenam, Mamba'ul Ulum mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul ***Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi***. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif

¹³ Trisni Utami, *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*, Vol. 25: 2, tahun 2010, hlm. 120.

¹⁴ Eka Evita, dkk, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1: 5, tahun 2009, hlm. 951.

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL cenderung pasrah dan menerima kebijakan relokasi tersebut karena didukung dengan komunikasi dari pemerintah yang efektif.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ditinjau, penelitian tersebut berfokus pada dampak dari relokasi khususnya dampak bagi PKL. Hal ini tentu berbeda dengan tema yang akan peneliti kaji yaitu berfokus pada proses dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi PKL berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 untuk melihat kunci sukses dari implentasi tersebut. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian pun berbeda yakni di Taman Kuliner Wonosari.

F. KERANGKA TEORI

1. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

a. Definisi Implementasi Kebijakan

Banyak ahli yang mengemukakan definisi tentang kebijakan publik. Menurut Wilson sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab bahwa kebijakan publik adalah *“The actions, objectives, and pronouncements of goverments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)”* yang berarti tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil atau

¹⁵ Mamba'ul Ulum, *Skripsi Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm. 74.

gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi.¹⁶

Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Bridgman dan Davis sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto mengungkapkan bahwa pada umumnya kebijakan publik mengandung pengertian mengenai “*whatever government choose to do or not to do*” artinya kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁷

Beberapa konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh Young dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto diantaranya:¹⁸

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 13.

¹⁷ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 3.

¹⁸ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 44.

3. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang telah dirumuskan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan publik yang bertujuan untuk mengatur publik itu sendiri. Kebijakan dirumuskan atas dasar keyakinan bahwa permasalahan publik tersebut bisa dipecahkan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi *stakeholder* dalam mengatur publik, oleh karena itu isi dan tujuan dari kebijakan haruslah jelas agar dapat diterima serta didukung oleh sasaran kebijakan.

Kebijakan hanya akan menjadi sebuah pernyataan yang tidak memiliki nilai apabila tidak diimplementasikan. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.¹⁹

¹⁹ Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 97.

Ripley dan Franklin sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno yang menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran nyata (*tangible output*).²⁰ Menurut Kamus Webster dalam Wahab, implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out*” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Kemudian menurut Jones pelaksanaan implementasi kebijakan menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resource*. Lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai “*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*”. Sedangkan menurut Donald S. Van Mater dan Carl E. Va sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo menyatakan bahwa implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok)

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: Buku Kita, 2008), hlm. 145.

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.²¹

Jones sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo menyatakan aktivitas implementasi kebijakan terdapat tiga macam, antara lain sebagai berikut:²²

1. *Organization; the establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a policy into effect.*
2. *Interpretation; the translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
3. *Application; the routine provision of service, payments, or other agree upon objectives or instruments.*

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran dari kebijakan umum ke kebijakan manajerial lalu ke kebijakan teknis operasional. Kebijakan umum menghasilkan peraturan daerah yang disusun DPRD bersama pemerintah daerah. Kemudian menuju ke kebijakan manajerial menghasilkan keputusan kepala daerah, terakhir kebijakan teknis operasional menghasilkan kebijakan kepala dinas atau pelaksana teknis operasional. Tahap interpretasi ini bukan hanya menjabarkan kebijakan saja, namun juga dikomunikasikan kepada sasaran kebijakan. Tujuan utamanya agar dapat memahami arah, tujuan, dan sasaran kebijakan tersebut hingga pada akhirnya kebijakan dapat diterima dan didukung.

²¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 86.

²² *Ibid.*, hlm. 89.

Tahap pengorganisasian memfokuskan pada koordinasi dan manajemen, baik proses, pelaku, anggaran, serta sarana prasarana yang dibutuhkan. Sedangkan tahap aplikasi merupakan bentuk penerapan dari program atau kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Pelaksana kebijakan biasanya terdiri dari Dinas, swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), atau bisa juga komponen masyarakat yang tentunya diberikan tanggungjawab. Selain itu pada tahap ini juga penting untuk menetapkan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana kebijakan. Tujuannya adalah agar semua pelaksana memahami apa yang harus dilakukan hingga mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

Selain SOP yang dijadikan sebagai pedoman, jadwal pelaksanaan kebijakan juga dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya keuangan dan peralatan pun ikut mendukung dalam kelancaran proses pelaksanaan kebijakan. Anggaran harus ditentukan darimana sumbernya dan peralatan yang digunakan pun harus memadai. Kaitannya dengan manajemen pelaksanaan kebijakan, pada tahap ini pula pola kepemimpinan dan koordinasi harus jelas lebih-lebih jika melibatkan beberapa lembaga. Tahap aplikasi merupakan tahap implementasi atau penerapan dari rencana yang telah disusun pada tahap sebelumnya.

Jadi, implementasi kebijakan merupakan penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang telah dirumuskan atau direncanakan

sebelumnya kepada sasaran kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan publik yang terjadi. Kebijakan yang akan diimplementasikan nantinya akan melalui tahapan interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Implementasi kebijakan diharapkan bisa mengatur dan menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat agar permasalahan publik tidak semakin parah.

b. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Teori George C. Edwards III (1980) sebagaimana dikutip oleh Subarsono menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.²³

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar

²³ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 90.

kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.²⁴ Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. *Pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. *Kedua*, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. *Ketiga*, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.²⁵

Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.²⁶ Edwards sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno mengidentifikasi enam

²⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 97.

²⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Jakarta: Buku Kita, 2008), hlm. 176.

²⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik...* hlm. 97.

faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan.²⁷

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan, yang berakibat ketidakefektifan implementasi kebijakan.²⁸

2) Sumberdaya

Sumberdaya yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan diantaranya sumber daya manusia, sumberdaya keuangan,

²⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses...* hlm. 177.

²⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Jakarta: Buku Seru, 2014), hlm. 180.

sumberdaya peralatan, dan sumberdaya informasi dan kewenangan.²⁹ Sumberdaya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitas saja melainkan juga kualitas. Jumlah pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan memang dibutuhkan, namun juga harus diimbangi oleh keterampilan atau potensi agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen semata.³⁰ Kebijakan selayaknya harus dijalankan dan dipatuhi, namun jika tidak ada kerjasama yang baik maka kebijakan tersebut akan sia-sia dan tidak memiliki *power* untuk diimplementasikan kepada sasaran.

Selain sumberdaya manusia, sumberdaya berupa anggaran pun juga dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya sumberdaya keuangan (anggaran), akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan menjadi rendah, bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku kebijakan yang telah

²⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 97.

³⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

ditetapkan.³¹ Jadi, besarnya intensif akan memengaruhi perilaku pelaku kebijakan sehingga anggaran ini harus dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan sebagaimana fungsinya.

Selanjutnya, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.³² Jika sumberdaya peralatan tidak diperbaharui atau ketinggalan zaman tentu tidak akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadi penghambat karena pelaksanaan kebijakan tetap harus akurat dan dipertanggungjawabkan.

Sumberdaya informasi dan kewenangan merupakan bagian dari suksesnya pelaksanaan kebijakan. Informasi menjadi hal penting untuk menjamin setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tidak mengalami kesalahpahaman akibat kebijakan tersebut. Informasi juga berfungsi sebagai titik kesadaran bagi pihak-pihak yang terlibat agar bersedia untuk mematuhi dan menjalankan tugasnya.

George E. Edward III (1980) sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo menyatakan bahwa kewenangan (*authory*) yang cukup untuk

³¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 101.

³² *Ibid.*, hlm. 102.

membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.³³

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.³⁴ Perilaku setiap aparat atau orang yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan memang berbeda-beda. Jika aparat mampu melaksanakan kebijakan dengan kejujuran maka kebijakan akan berjalan dengan efektif. Sebaliknya, jika aparat tidak mampu jujur dan berkomitmen dengan apa yang sudah diperintahkan maka kebijakan tersebut dinilai gagal.

Selain itu komitmen dan kejujuran, sikap demokratis yang dimiliki oleh implementor juga akan membawa kesan baik di depan kelompok sasaran. Implementor yang demokratis akan memberi kesempatan kepada kelompok sasaran untuk mengungkapkan pendapat dan tidak serta merta memaksa masyarakat untuk patuh terhadap dirinya maupun kebijakan. Hal ini tentu akan menurunkan resistensi masyarakat, sehingga masyarakat lebih peduli dan percaya terhadap implementor.³⁵ Edward III (1980) sebagaimana dikutip oleh

³³ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 103.

³⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

³⁵ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 32.

Joko Widodo menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.³⁶

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*).³⁷ Struktur birokrasi menyangkut dua hal penting yakni dimensi fragmentasi dan dimensi SOP (*Standard Operational Procedure*). Fragmentasi yang berarti membelah menjadi beberapa bagian atau terpecah-pecah akan mengganggu proses pelaksanaan kebijakan. Hal ini akan menimbulkan penyimpangan komunikasi sehingga antar pelaksana kebijakan tidak jalan beriringan. Begitu juga dengan SOP yang tidak jelas justru akan mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. SOP seperti halnya manajemen yang memuat sistem, tugas pokok, dan kewenangan akan membantu pelaksana kebijakan dalam melakukan tindakan implementasi kebijakan.

³⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 104.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

Struktur birokrasi juga dapat berpengaruh terhadap pelaku kebijakan, apabila hubungan antar mereka tidak terjalin secara harmonis maka dapat dipastikan akan timbul konflik. Selanjutnya, SOP yang jelas dapat memudahkan pelaku kebijakan dalam memahami dan mendalami arah dan tujuan kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat membentuk disposisi diri.

Secara ringkas, komunikasi merupakan hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya adalah menyangkut ketersediannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Disposisi adalah komitmen, lebih dari kompetensi dan kapabilitas. Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi karena menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.³⁸

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut saling berkaitan dan saling mendukung. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila empat variabel tersebut dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Komitmen dari pimpinan, pelaksana kebijakan, dan pelaku kebijakan sangat dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh semua pihak, karena pada hakikatnya kebijakan merupakan jawaban atas permasalahan yang harus diselesaikan.

³⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 226.

2. RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Di Indonesia, pembagian status ketenagakerjaan dapat didasarkan pada tenaga kerja formal dan informal. Karakteristik dari sektor formal sendiri biasanya memiliki skala usaha menengah hingga besar serta berbadan hukum dan diakui negara. Sektor formal cenderung dibatasi oleh kontrak yang telah disepakati baik jam kerja, hubungan kerja, maupun tempat usaha. Selain itu, kelayakan usaha yang dimiliki menjadi prioritas utama karena didukung dengan besarnya modal yang digunakan. Pada sektor formal, kegiatan usahapun sangat terorganisasi yang ditunjang dengan teknologi modern. Dari segi SDM, sektor formal juga mementingkan pendidikan secara profesional dan diimbangi dengan keterampilan yang telah didapatkan dari lembaga formal.³⁹

Berbeda dengan sektor formal, pada sektor informal kegiatan usahanya cenderung tidak terorganisasi. Skala usaha pada sektor informal relatif kecil dan tidak berbadan hukum. Jam kerja dan tempat usahanya pun fleksibel artinya tidak terikat kontrak, seperti halnya hubungan kerja yang berlandaskan asas kepercayaan saja. Kelayakan usaha pada sektor informal juga kurang diperhatikan atau seadanya karena modal yang dimiliki relatif kecil serta teknologi yang digunakan pun sederhana. Sedangkan SDM pada

³⁹ Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Sosial Sektor Informal*, (Malang: In-TRANS Publishing dan INSPIRE Indonesia, 2008), hlm. 15.

sektor informal menggunakan keterampilan yang telah dimiliki dan tidak terlalu mementingkan pendidikan formal atau profesional.⁴⁰

Berdasarkan karakteristik sektor formal dan sektor informal di atas, dalam hal ini PKL termasuk dalam sektor informal. Hal tersebut selaras dengan pendapat Bromley sebagaimana dikutip oleh Ali Achsan Mustafa yang menyatakan bahwa usaha pedagang kaki lima merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal kota.⁴¹ Selain konflik tanah, penggusuran, dan pemukiman kumuh, salah satu persoalan serius yang dihadapi berbagai kota besar dewasa ini adalah keberadaan sektor informal, khususnya PKL.

Menurut Evens & Korff sebagaimana dikutip oleh Ali Achsan Mustafa menyatakan bahwa definisi pedagang kaki lima adalah bagian dari sektor informal yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Di berbagai kota besar, PKL bukan hanya berfungsi sebagai penyangga kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal, tetapi juga memiliki peran besar yang menggairahkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan.⁴² Adapun ciri-ciri PKL adalah sebagai berikut:⁴³

⁴⁰ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 147.

⁴¹ Ali Achsan Mustafa, *Transformasi Sosial Sektor Informal*, (Malang: In-TRANS Publishing dan INSPIRE Indonesia, 2008), hlm. 43.

⁴² *Ibid.*, hlm. 42.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 45.

- 1) Lokasi berjualan PKL ada yang menetap di suatu tempat dan ada pula yang berkeliling untuk menjajakan dagangannya.
- 2) Modal yang dikeluarkan umumnya kecil biasanya menjajakan makanan, minuman, atau barang lain yang jumlahnya tidak terlalu besar sehingga perputaran uangnya pun juga tidak terlalu besar.
- 3) Produk yang dijual umumnya produk yang berkualitas rendah karena memperhitungkan modal dan keuntungan.
- 4) SDM yang mengelola dagangan tersebut biasanya pun turun temurun atau bahkan satu keluarga ikut andil dalam berdagang.
- 5) Waktu menjajakan dagangannya relatif fleksibel, menyesuaikan jenis produk, musim, maupun kesepakatan dengan PKL lainnya.
- 6) Kebanyakan dari PKL tidak memiliki jaminan keselamatan dari lokasi berdagang tersebut atau kelangsungan usaha jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas, atau penertiban aparat seperti satpol PP.

Dapat disimpulkan bahwa PKL merupakan sektor informal yang melakukan kegiatan ekonomi di tempat yang tidak tertentu dengan waktu fleksibel dan berpenghasilan relatif bahkan tidak tetap. Hal ini menunjukkan bahwa PKL tidak memiliki jaminan khusus baik untuk kelangsungan berdagang maupun masa depan mereka. Kuantitas pelanggan dan pendapatan yang semakin meningkat serta dianggap menguntungkan, membuat PKL tetap bertahan di satu tempat bahkan hingga tak layak huni.

Situasi ini menjadi masalah baru di perkotaan yang memaksa aparat harus turun tangan dengan melakukan relokasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relokasi merupakan pemindahan tempat.⁴⁴ Harianto sebagaimana dikutip oleh Sendy Noviko mendefinisikan relokasi sebagai suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Relokasi PKL harus mempertimbangkan faktor lokasi diantaranya strategis, mudah dijangkau, tersedia sarana prasarana, menarik secara visual, terjangkau secara ekonomi oleh pedagang.⁴⁵

Upaya relokasi yang dilakukan atas kebijakan di suatu daerah tidak sepenuhnya dapat diterima oleh para PKL. Relokasi yang sering terjadi justru menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak dimatangkan prosesnya sejak awal. PKL tidak bisa ditangani dengan kekerasan maupun paksaan, tindakan-tindakan persuasiflah yang akan menentukan apakah PKL akan berpartisipasi atau menjadi pihak yang kontra dalam relokasi tersebut.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang mana dalam sebuah metode mempunyai hal

⁴⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 739.

⁴⁵ Sendy Noviko, *Kebijakan Relokasi PKL (Studi tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan Mt Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)*, Jurnal Sawala, Vol 4: 3, tahun 2016, hlm. 52.

tersendiri yang perlu untuk diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁴⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu memperoleh data dengan cara pengamatan, gambaran, keadaan, realita, dan fenomena yang dilihat secara langsung. Sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di Taman Kuliner Wonosari.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam relokasi yang terdiri dari Disperindag Kabupaten Gunungkidul bagian Pengelolaan Pasar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul, PKL sisi selatan, PKL sisi utara, ketua PKLM dan masyarakat yang terdiri dari warga asli Kota Wonosari, remaja, serta tukang parkir di Taman Kuliner Wonosari. Sedangkan obyek pada penelitian ini adalah proses implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Obervasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.⁴⁷ Kegiatan observasi

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

dilakukan secara langsung namun nonpartisipatif artinya tanpa mengakibatkan perubahan pada aktivitas PKL di Taman Kuliner yang telah direlokasi oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Observasi telah dilakukan peneliti lebih dari 10 kali yang dibuktikan dengan lampiran foto.

b. Wawancara

Wawancara yang telah dilakukan peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Pada wawancara semi-terstruktur, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dimana informan bebas mengemukakan jawabannya, namun tetap pada kontrol tema pembicaraan. Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara sebagai patokan, namun pedoman disusun sedemikian rupa agar tidak kaku layaknya wawancara terstruktur.⁴⁸ Tidak semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk diwawancarai, oleh karena itu peneliti melakukan pengambilan sampel dengan teknik sampling *Purposive Sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁴⁹

Sejumlah 11 informan yang telah diwawancarai yaitu Disperindag Kabupaten Gunungkidul bagian Pengelolaan Pasar,

⁴⁷ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 101.

⁴⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123.

⁴⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 53.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gunungkidul, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul, PKL sisi selatan dua orang, PKL sisi utara dua orang, ketua PKLM dan masyarakat yang terdiri dari satu orang warga asli Kota Wonosari, satu orang remaja, serta satu orang tukang parkir di Taman Kuliner Wonosari. Wawancara dilakukan beriringan dengan observasi, untuk Satpol PP dan Dishub dilakukan wawancara pada saat jam kerja, sedangkan PKL, Ketua PKLM dan masyarakat dilakukan pada sore hari menjelang keramaian di Taman Kuliner Wonosari, khusus untuk Disperindag Pengelolaan Pasar dilakukan wawancara pada malam hari menyesuaikan dengan waktu luang informan sekaligus observasi Taman Kuliner Wonosari pada waktu tersebut. Pada saat wawancara, semua informasi yang telah dipaparkan oleh informan direkam untuk dijadikan data dalam menyusun penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yakni mengumpulkan dokumen dan gambar yang telah ada di masing-masing dinas terkait dengan pelaksanaan relokasi PKL. Melalui dokumentasi tersebut, peneliti dapat menggunakannya sebagai bukti otentik, menghimpun, dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Disperindag bagian Pengelolaan Pasar, Kantor Dishub, Kantor Satpol PP, dan Taman Kuliner Wonosari sebagai wadah relokasi PKL.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai dengan pendapat Huberman dan Miles sebagaimana dikutip oleh Emzir yang terdiri dari:⁵⁰

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan analisis yang bertujuan untuk memilih, mempertajam, membuang data-data yang tidak mendukung, serta menyusun data agar dapat ditarik kesimpulan dan digambarkan. Pada tahap ini, data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi telah direduksi sesuai dengan fokus atau tema penelitian yakni proses implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015, faktor-faktor yang memengaruhi, dan dampak dari relokasi.

b) Penyajian data

Penyajian data yang dilakukan peneliti diwujudkan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, maupun bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi agar peneliti dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dan tergiring untuk menggambarkan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian data secara deskriptif agar mudah dipahami.

⁵⁰ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 129.

c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap kesimpulan adalah lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan tidak untuk membuktikan hipotesis seperti halnya penelitian kuantitatif namun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diajukan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mulai memutuskan makna keberhasilan implementasi perda dari yang telah diteliti.

6. Keabsahan Data

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid yang reliabel. Dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan upaya validasi data. Obyektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh.⁵¹ Pada keabsahan data ini peneliti menggunakan Triangulasi untuk memeriksa keabsahan data.

Triangulasi telah dilakukan peneliti setelah data dari pelaksana relokasi, PKL, dan masyarakat terkumpul kemudian dilakukan pengecekan kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam relokasi PKL. Selanjutnya, triangulasi dilakukan pada sumber yang sama namun dengan waktu yang berbeda untuk menjamin konsistensi jawaban dan data dapat dipercaya. Terakhir, triangulasi juga dilakukan oleh peneliti berupa membandingkan informasi yang telah didapatkan dari informan dengan data atau dokumentasi yang ada.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 145.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian yang menunjukkan keterkaitan antar bab secara berurutan. Tujuan dari sistematika pembahasan sendiri yaitu memperjelas pembahasan dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran serta pembahasan pada skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai panduan sekaligus prosedur dalam melakukan penelitian.

Bab kedua merupakan gambaran umum, dimana peneliti memaparkan tentang gambaran umum Taman Kuliner Wonosari, PKL Taman Kuliner Wonosari, dan Profil Pelaksana Relokasi yang meliputi Disperindag, Dishub, serta Satpol PP Kabupaten Gunungkidul.

Bab ketiga merupakan pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya yakni proses implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi tersebut, dan dampak relokasi terhadap pemerintah, PKL, maupun masyarakat.

Bab keempat merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan untuk Pemda

Kabupaten Gunungkidul maupun pembaca yang akan meneliti lebih lanjut mengenai PKL di Taman Kuliner Wonosari ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pertumbuhan PKL yang semakin tinggi di kawasan Kantor Pemda Kabupaten Gunungkidul menimbulkan permasalahan pada tata ruang kota. Hal ini menuntut Bupati Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Akibat dari implementasi perda tersebut, seluruh PKL direlokasi menuju tempat peruntukkannya yakni Taman Kuliner Wonosari.

1. Implementasi perda ini melalui beberapa tahapan yakni Tahap Interpretasi, Tahap Pengorganisasian, dan Tahap Aplikasi. Pada tahap Interpretasi, bagian Pengelolaan Pasar melakukan sosialisasi kepada seluruh PKL. Pada tahap pengorganisasian, pelaksana menentukan sumber daya manusia yang akan terlibat, anggaran, peralatan, kewenangan yang disesuaikan dengan SOP dan Perda. Terakhir adalah Tahap Aplikasi dimana proses relokasi tersebut dilakukan. Hasilnya, relokasi yang dilakukan tidak menimbulkan konflik dan sesuai dengan tujuan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2015 Pasal 3.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi tersebut dilihat dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi ditransmisikan oleh pemerintah kepada PKL dengan jelas dan konsisten. Kuantitas sumberdaya diimbangi dengan kualitas

sumberdaya, dana dan peralatan yang memadai, serta kewenangan yang diberikan kepada sumberdaya tersebut jelas. Disposisi yang ditunjukkan oleh pemerintah yakni demokratis, jujur, dan memiliki komitmen yang kuat. Sedangkan struktur birokrasi tidak terfragmentasi karena sesuai SOP yang berlaku.

3. Secara umum pemerintah, PKL, dan masyarakat menerima dampak positif dengan relokasi ini namun, pendapatan PKL hingga saat ini masih belum stabil.

B. SARAN

Berdasarkan dari kajian hasil penelitian, maka penulis bermaksud ingin memberikan saran baik untuk pemerintah maupun peneliti selanjutnya. Beberapa saran berikut, harapannya bisa menjadi sumbangsih pikiran dan alternatif solusi yang bermanfaat.

1. Bagi pemerintah
 - a. Fasilitas yang telah tersedia di Taman Kuliner Wonosari menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk kembali datang ke tempat ini. Salah satunya adalah Panggung Rakyat yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muda, musisi, maupun budayawan lokal untuk menghibur pengunjung. Sebagian besar masyarakat pasti tertarik untuk menggunakan fasilitas tersebut, termasuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Melalui panggung ini, para siswa bisa menunjukkan bakat dan kreativitasnya dalam menghibur pengunjung.

Akan tetapi, pemerintah pun harus mensosialisasikan hal ini lebih intens kepada sasaran agar suasana Taman Kuliner Wonosari pada malam hari bisa hidup.

- b. Meskipun sudah ada wadah PKLM, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang formal untuk jangka waktu tertentu. Misalnya dengan bertemu dalam satu meja atau rapat koordinasi, hal ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengevaluasi permasalahan yang harus segera dipecahkan sehingga tidak ada pihak yang “gründel”.
- c. Mengadakan pelatihan atau workshop bagi pedagang sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan etos kerja dan keterampilan dalam berdagang. Pelatihan tersebut juga bertujuan untuk menggali potensi para pedagang guna menghadirkan inovasi kuliner yang baru, sehingga menarik perhatian pengunjung dan memengaruhi pendapatan pedagang.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi perda, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampak dengan adanya relokasi. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dikaji lebih dalam dari segi kesejahteraan ekonomi PKL untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pasca relokasi terhadap perekonomian PKL.

- b. Peneliti selanjutnya juga bisa mengkaji lebih dalam tentang resiliensi atau kemampuan PKL untuk beradaptasi serta menghadapi tantangan pesaing usaha, globalisasi, dan daya beli konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

BPS Kabupaten Gunungkidul, *Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul*, Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul, 2016.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Disperindag Kabupaten Gunungkidul, *Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul*. 2017.

Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.

Hamdi, Muchlis, *Kebijakan Publik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Mustafa, Ali Achsan, *Transformasi Sosial Sektor Informal*, Malang: In-TRANS Publishing dan INSPIRE Indonesia, 2008.

Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Satpol PP Kabupaten Gunungkidul, *Data dan Sistem Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul Semester II*, 2017.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.

- Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Jakarta: Buku Kita, 2008.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Jakarta: Buku Seru, 2014.

Jurnal dan Skripsi

- Evita, Eka, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No.5 Tahun 2009.
- Fatnawati, Nur, *Skripsi Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Heriyanto, Aji Wahyu, *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan Kota Semarang*, *Economics Development Analysis Journal*, Vol. 1 No. 2, tahun 2012.
- Laksono, Rudi, *Skripsi Analisis Relokasi Pedagang Pasar Ngrasopuro di Kota Surakarta*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Ulum, Mamba'ul, *Skripsi Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Utami, Trisni, *Jurnal Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan*, Vol. 25 No. 2, tahun 2010.
- Noviko, Sendy, *Kebijakan Relokasi PKL (Studi tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan Mt Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara)*, Jurnal Sawala, Vol. 4 No. 3, tahun 2016.

Internet

<http://jogja.tribunnews.com/2016/10/05/pedagang-di-jalan-pasar-kembang-menolak-direlokasi-ke-kawasan-lempuyangan> diakses pada tanggal 20 Desember 2017 pukul 10.59 WIB.

<https://www.merdeka.com/jakarta/tak-cukup-lima-tahun-bersihkan-tanah-abang-dari-pkl.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2017 pukul 18.39 WIB.

Undang-Undang

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

UUD RI 1945 Pasal 27 tentang Hak Asasi Manusia.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Larno selaku Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 11 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB dan 15 Maret 2018 pukul 20.08 WIB.

Wawancara dengan Bapak Junjung selaku Satpol PP Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Bidang Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Deny salah satu pedagang di Taman Kuliner Wonosari pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 09.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Decy salah satu pedagang di Taman Kuliner Wonosari pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sutarmono selaku ketua PKLM Taman Kuliner Wonosari pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Anto salah satu masyarakat asli Kota Wonosari pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 06.48 WIB.

Wawancara dengan Rita salah satu mahasiswa di Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 16.40 WIB.

Wawancara dengan Bapak Basuki salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai juru parkir pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.